



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AI SALAMAH
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 453130

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 440.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/60 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/67 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 115.900.000

1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000
3. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 200.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 755.900.000

III. HUTANG Rp. 130.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 625.900.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

Bukti Penerimaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Direktorat Jenderal Pajak <no-reply@pajak.go.id>
Kepada: salamahlearning78@gmail.com

9 Februari 2026 pukul 09.02



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 ♦ informasi@pajak.go.id ♦ pengaduan@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE	: BPE-25225/CT/KPP.3310/2026
Tanggal	: 09 Februari 2026
NPWP	: 3271045311650004
Nama Wajib Pajak	: AI SALAMAH
Jenis SPT	: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak	: 2025
Masa Pajak	: Januari - Desember 2025
Status SPT	: Normal
Saluran	: Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	: 09 Februari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.

Mohon simpan email ini sebagai arsip pribadi Anda.

TAHUN PAJAK/ BAGIAN TAHUN PAJAK/	PERIODE			STATUS	SUMBER PENGHASILAN	METODE PEMBUKUAN
2025	1 BULAN MULAI	s.d	12 BULAN AKHIR	NORMAL	Pekerjaan	Pencatatan

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NIK/NPWP

3271045311650004

2. Nama

AI SALAMAH

3. Jenis ID

KTP

4. No. ID

3271045311650004

5. No. Telepon

08119116595

6. Email

salamahlearning78@gmail.com

7. Status Kewajiban Perpajakan Suami dan Istri

(Jika status kewajiban perpajakan Anda dengan pasangan adalah PH/MT, Anda diwajibkan mengisi bagian ini dan Lampiran 4 Bagian B)

8. NIK/NPWP Suami/Istri

3271041003660005

B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1

a

Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan?
1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
2. Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian D)

2

190.461.175

b

1) Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas?
1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan 1c)
2. Ya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

1

2) Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)?
1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
2. Ya, saya termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final. (Isi Lampiran 3B Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)
3. Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT. (Isi Lampiran 3B Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

3) Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto?
1. Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
2. Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan (Lanjut ke pertanyaan 1c)
3. Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. (Isi Lampiran 3B Bagian C, Lampiran 3A-4 Bagian A, lalu ke pertanyaan 1c)

4) Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan?
1. Dagang (Isi Lampiran 3A-1, lalu ke pertanyaan selanjutnya)
2. Jasa. (Isi Lampiran 3A-2, lalu ke pertanyaan selanjutnya)
3. Industri. (Isi Lampiran 3A-3, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

5) Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

0

c

Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya?
1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
2. Ya. (Isi Lampiran 3A-4 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

1

0

d

Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri?
1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
2. Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

1

0

C. PERHITUNGAN PPh TERUTANG

2

Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)

190.461.175

3

Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2?
1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
2. Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian A dan/atau Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

1

0

4

Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)

190.461.175

5

Penghasilan tidak kena pajak

TK/0 = 54.000.000

54.000.000

6

Penghasilan kena pajak (4-5)

136.461.000

7

PPh terutang

14.469.150

8

Apakah terdapat pengurang PPh terutang?
1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
2. Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

1

0

9

PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)

14.469.150

D. KREDIT PAJAK

10

a

Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain?
1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
2. Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian E, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

2

14.469.150

b

Angsuran PPh Pasal 25

0

c

STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak)

0

d

Apakah Anda menerima pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan?
1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
2. Ya. (Isi dengan jumlah pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

1

0

